

PENGARUH TAMAN WISATA ALAM PANGANDARAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

(Studi: Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)

Influencing Nature Tourism Park of Pangandaran to The Social Life of Local Communities

Dini Dhalyana*) dan Soeryo Adiwibowo

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

*)Email : dinidhalyana@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study carried out along month of April 2012 at Pangandaran village, Pangandaran Subdistrict, Ciamis Regency of West Java. The objective of this study, first, is to identify type of job opportunities that have been created as a result of tourism activities at Pangandaran; second, to analyze the contribution of the income of the aforementioned job to the total household income; and third, to depict the influence tourism activities to the social life of local communities. A quantitative approach supported by qualitative data is applied. Amount of 63 household respondents from various job types were interviewed. Along with that an in-depth interviewed supported with literary study are applied. The results show that, on the one hand, tourism activities of Pangandaran have been contributed significantly to the job creations as well as to the household income of local community. Furthermore, a good atmosphere of cooperation among business actors occurred at Pangandaran. On the other hand, however, tourism activities in Pangandaran seem created adverse influence to the community life such as changing lifestyle and deviant behavior.

Keywords: household income, jobs at tourism sectore, local communities, social life, tourism

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan selama bulan April 2012 di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini, pertama mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh di Taman Wisata Alam Pangandaran akibat adanya kegiatan pariwisata. Kedua, menganalisis kontribusi pekerjaan di sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan rumah tangga pelaku usahanya. Ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan sosial penduduk lokal. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sekitar 63 responden rumahtangga yang diwawancarai berasal dari jenis pekerjaan yang berbeda. Selama pengambilan data dilakukan wawancara mendalam yang didukung dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sektor pariwisata di Pangandaran telah menciptakan lapangan pekerjaan terutama terhadap total pendapatan rumah tangga penduduk lokal. Sementara pada pola kerjasama antar sesama pelaku usaha, keberadaan industri pariwisata mempererat hubungan diantara pelaku usaha. Namun disisi lain, aktivitas wisata di Pangandaran memberikan pengaruh lain kehidupan masyarakat, seperti perubahan gaya hidup dan perilaku menyimpang.

Kata kunci : kehidupan sosial, masyarakat lokal, pendapatan rumah tangga, pekerjaan pada sektor wisata, wisata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan yang melimpah. Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut 5,8 juta km² dan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.290 km. Indonesia memiliki populasi 237.556.400 juta jiwa dan kepadatan penduduk 124 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik 2010). Letak Indonesia yang sangat strategis membuatnya dikenal sebagai zamrud

khatulistiwa yang memiliki pesona keanekaragaman alam dan budaya. Berbagai keistimewaan tersebut menjadi potensi Indonesia untuk dapat mengembangkan pariwisata terutama pariwisata alamnya. Perkembangan pariwisata memiliki andil cukup besar dalam kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian negara.

Pariwisata merupakan sektor ekonomi alternatif yang dipandang mampu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Yoeti, 2008). Sepanjang Januari-Agustus 2010 sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar US\$ 4.63 miliar terhadap perekonomian nasional (Bappenas, 2008). Pada tahun 2004, kontribusi pariwisata

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah sebesar 113.78 triliun rupiah atau sebesar 5.01 persen dari total PDB nasional. Pada tahun 2005 kontribusi sektor pariwisata meningkat sebesar 33.02 triliun rupiah sehingga menjadi 146.8 triliun rupiah atau 5.27 persen dari total PDB nasional. Sementara pada tahun 2006 kontribusi pariwisata mengalami penurunan menjadi 143.62 triliun rupiah atau 4.30 persen terhadap PDB nasional. Namun, pada tahun 2007 kontribusi pariwisata kembali meningkat menjadi 169.67 triliun rupiah atau sebesar 4.29 persen dari total keseluruhan PDB nasional.

Selain memiliki kontribusi terhadap PDB nasional, pariwisata juga memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2004, pariwisata memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja sebanyak 8,49 juta orang atau 9,06 persen dari total lapangan kerja nasional. Pada tahun 2005 kontribusi pariwisata menurun menjadi 6,55 juta orang atau 6,97 persen dari total lapangan kerja nasional (93,96 juta orang). Pada tahun 2006 kembali menurun menjadi 4,41 juta orang atau 4,65 persen dari total lapangan kerja. Namun, pada tahun 2007 kontribusi pariwisata terhadap lapangan kerja meningkat menjadi 5,22 juta orang atau 5,22 persen dari total lapangan kerja sebesar 99,93 juta orang (Bappenas, 2008).

Pengembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan perolehan devisa negara, namun diharapkan dapat berperan sebagai katalisator pembangunan. Pengembangan pariwisata di Indonesia memiliki delapan keuntungan, yaitu meningkatkan kesempatan berusaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan nasional, mempercepat proses pemerataan pendapatan, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, memperluas pasar produk dalam negeri, dan memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor maupun perdagangan luar negeri (Bappenas, 2008).

Di sisi lain, Retnowati (2004) mengungkapkan bahwa pariwisata juga berpotensi memicu terjadinya perubahan perilaku masyarakat, memudarnya nilai dan norma sosial, kehilangan identitas, konflik sosial, pergeseran mata pencaharian, serta kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Berbagai hal ini rentan terjadi di masyarakat setelah adanya pariwisata. Namun, berbagai dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan akibat adanya industri pariwisata dapat diantisipasi oleh masyarakat itu sendiri.

Propinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35 377.76 km². Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 populasi penduduk Jawa Barat mencapai 43 juta jiwa. Unit pemerintahan Propinsi Jawa Barat dibagi atas 17 kabupaten dan 9 kota (Badan Pusat Statistik 2010). Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang unik baik budaya, alam, maupun kehidupan masyarakat tradisional (*living culture*). Keunggulan dan keunikan dari masing-masing wilayah tersebut dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai tujuan wisata berskala nasional maupun internasional.

Salah satu obyek wisata di Propinsi Jawa Barat yang paling terkenal adalah Taman Wisata Alam Pangandaran yang terletak di Kabupaten Ciamis. Daya tarik Pangandaran sebagai obyek wisata alam sudah dikenal sejak masa

pemerintahan Hindia Belanda. Di masa Orde Baru, hutan dan pantai Pangandaran ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran pada tanggal 10 Maret 1978, melalui SK Mentan No. 170/Ktps/Um/1978. Daya tarik TWA Pangandaran ini dari sudut ekonomi dapat dikatakan merupakan unsur penawaran (*supply*). Sementara derasnya arus wisatawan yang mengalir ke TWA Pangandaran dapat dikatakan sebagai unsur permintaan (*demand*) terhadap obyek wisata.

Pertanyaan Penelitian

Terkait dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang tumbuh di TWA Pangandaran akibat adanya kegiatan pariwisata. 2) Seberapa besar kontribusi pekerjaan di sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan rumah tangga pelaku usahanya? 3) Sejauh mana kegiatan pariwisata di TWA Pangandaran membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial penduduk Pangandaran khususnya dalam hal kerjasama, gaya hidup, dan tumbuhnya perilaku menyimpang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, disusunlah beberapa tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu: 1) Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh di TWA Pangandaran akibat adanya kegiatan pariwisata. 2) Menganalisis kontribusi pekerjaan di sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan rumah tangga pelaku usahanya. 3) Menganalisis pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan sosial penduduk Pangandaran khususnya dalam hal kerjasama, gaya hidup, dan timbulnya perilaku menyimpang.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 1) Bagi akademisi, diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai dampak sosial ekonomi pariwisata terhadap masyarakat. 2) Bagi perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata khususnya pariwisata TWA Pangandaran dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. 2) Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai masukan dalam membuat kebijakan terkait dengan aktivitas pariwisata.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Konsep Pariwisata

Wisata dapat didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi untuk merelaksasikan pikiran dari pekerjaan rutin. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah

daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Keindahan alam baik secara fisik maupun keanekaragaman hayati merupakan hal penting untuk keberlangsungan aktivitas pariwisata. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia, yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Secara umum, aktivitas pariwisata meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi secara terpadu. Dalam aktivitas wisata, tentu melibatkan banyak pelaku yang memiliki peran berbeda-beda. Damanik dan Weber (2006) mengungkapkan setidaknya ada 6 pelaku yang terlibat dalam aktivitas wisata, yaitu: (i) wisatawan; (ii) industri pariwisata, yang dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu: pertama, pelaku langsung yaitu usaha wisata yang menawarkan jasa yang dibutuhkan langsung oleh wisatawan, seperti tempat penginapan, restoran; kedua, pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, seperti usaha kerajinan tangan; (iii) pendukung jasa wisata; (iv) pemerintah, memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur; (v) masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata; (vi) lembaga swadaya masyarakat (LSM), melakukan berbagai kegiatan terkait dengan konservasi dan regulasi kepemilikan serta pengusahaan sumberdaya alam setempat.

Dampak Pariwisata

Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting tetapi apabila tidak dilakukan dengan benar, maka pariwisata berpotensi menimbulkan masalah atau dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan Suwanto, (1997). Yoeti, (2008) mengemukakan bahwa pariwisata sebagai katalisator dalam pembangunan karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Clement dikutip Yoeti (2008) mengatakan dampak pariwisata idealnya dilihat melalui pendekatan komperheensif. Ada keterkaitan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketimpangan pada salah satu aspek akan berpengaruh pada aspek lainnya. Oleh karenanya, tantangan pembangunan pariwisata terletak pada kemampuan untuk memfasilitasi semua kepentingan

lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam proporsi yang seimbang dan saling menunjang.

Menurut Retnowati (2004), adanya aktivitas ekowisata (pariwisata) dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat dengan pembukaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pendanaan yang diserap kembali dalam bentuk proyek-proyek pembangunan daerah. Yoeti (2008) mengungkapkan bahwa berdasarkan kacamata ekonomi makro, pariwisata memberikan dampak positif yaitu: (i) dapat menciptakan kesempatan berusaha; (ii) dapat meningkatkan kesempatan kerja (*employment*); (iii) Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat; (iv) dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah; (v) dapat meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB); (vi) dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya; (vii) dapat memperkuat neraca pembayaran.

Dalam melihat dampak sosial budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat, Pitana dan Gayatri (2004) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang *internally totally integrated entity*, melainkan harus juga dilihat segmen-segmen yang ada atau melihat *interest groups*. Hal tersebut disebabkan dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama bahkan bisa bertolak belakang dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat sangat sulit diukur dan umumnya dipandang oleh masyarakat setempat hanya memberikan dampak negatif. Dampak positif sosial budaya dari aktivitas pariwisata adalah terjadinya pemahaman dan saling pengertian antar budaya (*intercultural understanding*) antara pengunjung wisata dengan masyarakat setempat, dimana pengunjung (turis) mengenal dan menghargai kehidupan sosial budaya masyarakat setempat dan sebaliknya masyarakat setempat juga dapat memahami dan menghargai latar belakang sosial budaya turis. Masyarakat terkadang memandang turis sebagai orang yang lebih kaya dan lebih baik secara sosial dengan gaya hidup yang menyenangkan sehingga mereka berusaha meniru gaya hidup turis yang mereka lihat.

Wood (1994) dikutip Pitana dan Gayatri (2004) mengemukakan bahwa didalam melihat pengaruh pariwisata terhadap masyarakat (dan kebudayaan) harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdeferensiasi, aktif, dan selalu berubah. Oleh karena itu, pendekatan yang kiranya baik adalah dengan menganggap bahwa pariwisata adalah "pengaruh dari luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat" dimana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya.

Peran Serta Masyarakat

Hoofsteede (1986) dikutip Khairudin (1992) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dari dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian. Menurut Khairudin (1992), peran serta masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima

tanggung jawab dan aktivitas tertentu. Dari hal-hal di atas maka peran serta masyarakat dapat disimpulkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan aktivitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi sumberdaya yang dimilikinya.

Beberapa kegiatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata dapat berupa (Smith dikutip Fandeli, 2000):

1. Menyediakan berbagai produk wisata sebagai kebutuhan wisatawan, seperti jasa transportasi, akomodasi, dll.
2. Menjaga *image* dari kawasan wisata sehingga tetap menarik bagi para wisatawan maupun calon wisatawan.
3. Ikut menjaga kondisi kawasan baik secara fisik maupun sosial, seperti keamanan, kenyamanan dan sistem budaya.
4. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap berpartisipasi secara menyeluruh dalam usaha memperkenalkan kawasan wisata yang ada di daerahnya.
5. Ikut serta dalam promosi atau publikasi yang diadakan.
6. Sumber informasi, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran dalam usaha pengembangan pariwisata.
7. Pengusaha, masyarakat dapat mendirikan usaha ataupun menjual produk.
8. Pengendali, masyarakat yang masih menjunjung tinggi kelestarian daerahnya tentu akan berusaha mempertahankan kelestarian lingkungan dan budayanya.

Migrasi Penduduk

Seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat tinggal secara permanen atau relatif permanen (untuk jangka waktu minimal tertentu) dengan menempuh jarak minimal tertentu atau pindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis sering berarti unit administratif pemerintahan baik berupa negara maupun bagian-bagian dari negara. Migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk geografis, spasial, atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Orang yang melakukan migrasi disebut dengan migran, karena itu seseorang yang disebut sebagai migran ada kemungkinan telah melakukan migrasi lebih dari satu kali (Rusli, 1996).

Rusli (1996) mengemukakan adanya beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan migrasi, dibedakan menjadi faktor penarik dan pendorong, yaitu:

- Faktor penarik: adanya daya tarik (superior) ditempat daerah tujuan untuk memperoleh kesempatan kerja seperti yang diinginkan (cocok); kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik; kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik sesuai yang diinginkan; kondisi daerah tujuan yang lebih unggul atau menyenangkan: iklim, sekolah, perumahan, fasilitas lain; daya tarik aktivitas daerah tujuan: tempat hiburan, wisata, dan lain-lain
- Faktor Pendorong: makin berkurangnya sumber daya

alam dan kebutuhan akan bahan baku di daerah asal dan melimpahnya bahan baku di daerah; berkurangnya kesempatan kerja di daerah asal; Adanya tekanan-tekanan di daerah asal (etnisitas, agama, dan lain-lain); Bencana alam, wabah penyakit.

Adanya aktivitas pariwisata pada suatu daerah menjadi daya tarik bagi seseorang untuk dapat mencari nafkah di daerah tujuan wisata. Hal ini disebabkan adanya pariwisata dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Daya tarik pariwisata juga menimbulkan terjadinya migrasi masuk (*in migration*). Menurut Badan Pusat Statistik (2010), migrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah lain melewati batas wilayah tertentu yang dilalui dalam perpindahan tersebut. Sementara migrasi masuk (*in migration*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*area of destination*). Rusli (1996) menyebutkan seseorang yang melakukan migrasi dikatakan sebagai migran masuk bila dilihat dari sudut pandang daerah tujuan dan migran keluar bila dilihat dari daerah asal.

Proses Sosial (Kerjasama)

Soekanto (1990) mengungkapkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* (yang artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara harafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*).

Menurut Soekanto (1990) proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan (*assosiatif*) dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Kerjasama berarti bekerja bersama dalam rangka mencapai sesuatu tujuan bersama. Beberapa sosiolog menganggap kerjasama sebagai bentuk interaksi sosial yang pokok. Namun, ada pula yang menganggap sebagai proses utama. Lima bentuk kerja sama menurut Thompson dan McEwen (1958) dikutip Soekanto (1990), yaitu: (i) kerukunan; (ii) bargaining; (iii) kooptasi, proses penerimaan unsur-unsur baru; (iv) koalisi, kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan-tujuan yang sama; (v) *joint-ventrue*, kerjasama dalam perusahaan-perusahaan tertentu seperti pengeboran minyak, perhotelan, dan sebagainya.
- b) Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam

interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.

c) Asimilasi merupakan proses-proses sosial dalam taraf lanjut. Hal ini ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Gaya Hidup dan Perilaku Menyimpang (Deviation)

Gaya hidup menurut pengertian kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di masyarakat. Soekanto (1990) lebih jelasnya mendefinisikan gaya hidup sebagai serangkaian pola hidup dan perilaku masyarakat yang terealisasi melalui konsumsi, sikap hidup, dan pergaulan. Gaya hidup dapat menjadi indikator tentang bagaimana orang atau masyarakat mengkonsumsi pendapatan yang diperolehnya serta bagaimana sikap dan perilakunya dalam berhubungan dengan orang lain dalam situasi dan kondisi tertentu. Gaya hidup merupakan penyaringan dari serentetan interaksi sosial, budaya, dan keadaan.

Soekanto (1990) menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan kaidah-kaidah sebagai pengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan masyarakatnya. Kaidah atau peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat ditujukan agar tumbuh *conformity* warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. *Conformity* adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat, dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, *deviation* adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan dalam masyarakat tradisional, tradisi sangat kuat sehingga kaidah yang berlaku diturunkan dari generasi ke generasi tetap sama. Masyarakat tradisional kurang berhubungan dengan dunia luar sehingga memperkecil kemungkinan melakukan tindakan yang menyimpang dari tradisi. Berbeda halnya dengan masyarakat kota, masyarakat kota selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kotanya. Kota merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh-pengaruh luar. Dengan demikian, kaidah-kaidah dalam kota selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Merton (1967) dikutip Soekanto (1990) mengungkapkan bahwa diantara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur penting yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Koentjaraningrat (1969) dikutip Soekanto (1990) mengartikan pernyataan Merton tersebut bahwa ada nilai sosial dan budaya yang merupakan rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selain itu, ada pula kaidah yang mengatur kegiatan manusia untuk mencapai cita-cita tersebut. Nilai-nilai sosial dan budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidakserasian antara aspirasi dengan

saluran-saluran yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka terjadilah perilaku menyimpang atau *deviant behavior*.

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga menurut Nurmanaf (1985) adalah aliran uang, barang, jasa, dan kepuasan yang diperoleh dibawah penguasaan keluarga untuk digunakan dalam memuaskan kebutuhan dan kewajibannya. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari satu maupun beragam macam sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang beragam tersebut dapat terjadi karena anggota rumah tangga yang bekerja melakukan lebih dari satu jenis kegiatan dan atau masing-masing anggota rumah tangga mempunyai kegiatan yang berbeda satu sama lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010) konsep pendapatan rumah tangga adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan dapat berasal dari:

- Balas jasa faktor produksi tenaga kerja, yaitu upah/gaji, keuntungan, bonus yang mencakup dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja sebagai imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan.
- Balas jasa kapital, yaitu bunga, bagi hasil dari hasil usaha seluruh anggota rumah tangga.
- Pendapatan yang berasal dari pihak lain yaitu pendapatan diluar upah/gaji yang menyangkut dari: (i) perkiraan sewa rumah milik sendiri; (ii) bunga deviden; (iii) bukan hasil usaha; (iv) pensiunan; (v) kiriman dari famili/pihak lain secara rutin, ikatan dinas.

Strategi Nafkah Rumah Tangga

Pengertian nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara hidup, biasanya disejajarkan dengan konsep *livelihood* (mata pencaharian). Secara sederhana, *livelihood* didefinisikan sebagai cara dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup (Chamber *et al.* dikutip Dharmawan 2001). Menurut Dharmawan (2006), *livelihood* memiliki pengertian lebih luas, bukan hanya *means of living*. Dalam sosiologi nafkah, pengertian strategi nafkah lebih mengarah pada pengertian strategi penghidupan (*livelihood strategy*) daripada strategi cara hidup (*means of living strategy*). Pengertian *livelihood strategy* disamakan pengertiannya dengan strategi nafkah (dalam bahasa Indonesia) dan dimaknai lebih besar tidak hanya sekedar "aktivitas mencari nafkah". Sebagai strategi membangun sistem penghidupan, strategi nafkah dapat didekati melalui berbagai cara aksi individu maupun kolektif. Strategi nafkah dapat berarti cara bertahan hidup atau memperbaiki status penghidupan. Strategi nafkah merupakan taktik dan aksi yang dibangun oleh individu ataupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka dengan tetap memperhatikan infrastruktur sosial, struktur sosial, dan sistem nilai budaya yang berlaku.

Strategi nafkah timbul di tingkat individu, namun setiap akhir dari kegiatan ini didefinisikan pada tingkat rumah tangga. Definisi dari strategi nafkah sendiri adalah segala kegiatan atau keputusan yang diambil anggota rumah tangga untuk bertahan hidup (*survival*) dan/atau membuat hidup lebih baik. Tujuan dari bertahan hidup, berarti membangun beberapa strategi untuk keamanan dan keseimbangan

mata pencaharian rumah tangga (Dharmawan, 2001). Scoones (1998) mengungkapkan strategi nafkah yang umumnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan meliputi: (1) Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi); (2) Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan. Atau dengan mengarahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu dan anak) untuk ikut bekerja –selain pertanian– dan memperoleh pendapatan; (3) Rekayasa spasial (migrasi) merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Dharmawan (2001), nafkah ganda atau beragam sumber pendapatan berarti sebuah kombinasi dari banyak pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ekonomi pokok di bidang pertanian dan nonpertanian, dimana aktivitas yang terakhir adalah sampingan diluar pekerjaan pokok dari sebuah bentuk rumah tangga. Pekerjaan ini mungkin dilakukan oleh kepala rumah tangga atau anggota dari sebuah rumah tangga dan aktivitas tersebut mungkin secara langsung atau tidak langsung, tetapi secara positif menciptakan pendapatan yang esensial untuk menjamin keberadaan rumah tangga.

Kerangka Pemikiran

Penetapan kawasan Taman Wisata Alam Pangandaran sebagai obyek wisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Menurut Yoeti (2008), pariwisata dipandang sebagai katalisator dalam pembangunan karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Di sisi lain, pariwisata juga menimbulkan pengaruh negatif. Menurut Wood (1994) dikutip Pitana dan Gayatri (2004), pariwisata dipandang sebagai “pengaruh dari luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat” dimana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya. Kehadiran pariwisata di TWA Pangandaran berdampak pada kondisi sosial masyarakat lokal, yaitu pergeseran nilai-nilai dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh kehadiran wisatawan dan penduduk pendatang. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi menarik untuk ditelaah bahwa:

- 1) Se jauh mana kehadiran industri pariwisata di TWA Pangandaran memberi pengaruh terhadap peran serta masyarakat lokal dalam memanfaatkan berbagai lapangan pekerjaan dan juga dalam menjaga keindahan kawasan wisata.
- 2) Kehadiran industri pariwisata telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pada umumnya, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan berhubungan nyata dengan perekonomian rumah tangga. Oleh karenanya, menarik untuk dikaji, sejauh mana pekerjaan di industri pariwisata Pangandaran dapat berpengaruh pada pendapatan rumah tangga yang terlibat di dalamnya. Pengaruh ini terutama diukur dari segi tingkat pendapatan rumah tangga, status dan jenis pekerjaan, dan apakah terjadi pola nafkah ganda dalam rumah tangga

3) Kawasan wisata Pangandaran merupakan salah satu wisata unggulan di Jawa Barat. Hal ini membuat banyak wisatawan mengunjungi kawasan tersebut. Perkembangan pariwisata di kawasan TWA Pangandaran mengakibatkan banyak masyarakat setempat bekerja di sektor ini. Bahkan, masyarakat pendatang juga tertarik untuk ikut terlibat didalam industri pariwisata. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pengaruh peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan migrasi masuk terhadap kondisi sosial masyarakat lokal. Pengaruh ini terutama diukur dari segi pola kerjasama, gaya hidup, dan perilaku menyimpang.

Penjelasan mengenai kerangka pemikiran disajikan dalam Gambar 1 berikut ini.



Keterangan: —> : hubungan pengaruh
 [---] : fokus penelitian

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Penyusunan hipotesis bertujuan untuk memudahkan peneliti menjawab permasalahan dan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis:

1. Pekerjaan di sektor pariwisata menyumbang cukup nyata terhadap pendapatan rumah tangga
2. Kegiatan pariwisata di TWA Pangandaran mengakibatkan perubahan pada pola kerjasama, gaya hidup, dan timbulnya perilaku menyimpang di kalangan masyarakat Pangandaran.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep-konsep yang dibuat untuk membantu dalam pengumpulan data di lapangan, serta membantu dalam mengolah dan menganalisis data. Sejumlah konsep operasional yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Peran serta masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata adalah bentuk peran serta responden yang merupakan penduduk lokal dalam kegiatan pariwisata dapat berupa gagasan, materi, maupun tenaga, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Ukuran yang digunakan dalam variabel ini berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan yang ada di masyarakat Pangandaran dan bentuk peran serta responden dalam kegiatan tersebut.
2. Migrasi masuk dalam penelitian ini adalah masuknya penduduk (luar daerah Pangandaran) ke kawasan TWA Pangandaran untuk bekerja dalam kegiatan pariwisata baik bersifat sementara, jangka waktu tertentu, maupun seumur hidup. Ukuran yang digunakan dalam variabel ini berdasarkan pengaruh dari adanya migrasi masuk terhadap masyarakat lokal khususnya dalam hal akses terhadap ruang usaha di industri pariwisata dan gaya hidup masyarakat.
3. Jenis-jenis pekerjaan di sektor pariwisata adalah berbagai pekerjaan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan wisatawan dan kegiatan wisata. Jenis pekerjaan industri pariwisata dalam penelitian ini dikategorikan menjadi:
 - Akomodasi/penginapan (*homestay*, hotel, pondok wisata)
 - Transportasi (ojek, becak, travel/biro perjalanan, angkutan umum, ojek perahu)
 - Usaha rumah makan dan jasa kuliner (restoran, warung makan, kafe)
 - Penyedia jasa/penyewaan (*guide*, foto keliling, sewa ban, sepeda)
 - Pedagang (kaki lima, asongan, kios/warung)
4. Status pekerjaan menurut Badan Pusat Statistik (2010) adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan. Status tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori:
 - Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
 - Berusaha sendiri dengan bantuan anggota keluarga/karyawan sementara
 - Pengusaha dengan pekerja tetap
 - Karyawan
 - Pekerja tidak dibayar, yaitu seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.
5. Tingkat kerjasama adalah keterlibatan responden dalam kegiatan kerjasama khususnya dalam hal akses pada ruang usaha industri pariwisata. Ukuran yang digunakan dalam variabel ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan dan keterlibatan responden dalam kerjasama tersebut. Pengukuran tingkat kerjasama ditujukan untuk membuktikan hipotesis kedua, apakah dengan adanya kegiatan pariwisata menggeser pola kerjasama masyarakat yang ke arah positif (semakin erat) atau negatif (timbul persaingan).
6. Tingkat gaya hidup dalam penelitian ini mengacu pada pengertian dari Soekanto (1990) yaitu serangkaian pola hidup dan perilaku masyarakat yang terealisasi melalui konsumsi, sikap hidup, dan pergaulan. Gaya hidup

dapat menjadi indikator tentang bagaimana sikap dan perilakunya dalam berhubungan dengan orang lain dalam situasi dan kondisi tertentu. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam variabel ini adalah pandangan responden terhadap pengaruh wisatawan/migran dalam hal berpenampilan, gaya bahasa, penggunaan teknologi, pola konsumsi, dan pergaulan remaja.

7. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti perjudian, kriminalitas, prostitusi. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam variabel ini berdasarkan bentuk-bentuk dan frekuensi perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat Pangandaran.

8. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pemasukan yang diterima responden dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun selama bulan April 2011 hingga Maret 2012, dipilih berdasarkan waktu terdekat dengan waktu pengambilan data. Perhitungan pendapatan diperoleh dari total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga baik dari mata pencaharian di bidang pariwisata maupun nonpariwisata.

9. Pola nafkah ganda yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang diungkapkan oleh Scoones (1998) yaitu penerapan pola nafkah yang beragam dengan cara mencari pekerjaan lain selain pekerjaan utama untuk menambah pendapatan. Atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja dan memperoleh pendapatan. Ukuran yang digunakan dalam variabel ini berdasarkan ada atau tidaknya pola nafkah ganda dan keberagaman jenis pekerjaan pada rumah tangga responden.

Pendekatan Lapangan

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di salah satu lokasi pusat aktivitas pariwisata yaitu di Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Obyek wisata di TWA Pangandaran telah ada sejak lama dan merupakan obyek wisata unggulan di Jawa Barat. Dari berbagai obyek wisata yang ditawarkan, Pantai Pangandaran merupakan obyek daya tarik wisata utama di kawasan pariwisata ini. Oleh karena itu, hampir seluruh pusat aktivitas dan industri pariwisata dilakukan di sepanjang kawasan pantai ini. Adanya industri pariwisata tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Berdasarkan alasan tersebut, maka lokasi ini dipilih dan diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan April 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk menggali fakta, data, dan informasi adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan informasi dan data dilakukan di sekitar kawasan TWA Pangandaran, Desa Pangandaran dan Kecamatan Pangandaran untuk mendukung penelitian. Hal ini dilakukan karena pengelolaan pariwisata di Pangandaran dikelola oleh Kecamatan Pangandaran sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Desa Pangandaran sebagai

lokasi dari aktivitas wisata. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei kepada masyarakat dengan menggunakan kuesioner.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan maupun responden serta mengkaji beberapa literatur terkait. Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari aparat desa dan kecamatan Pangandaran, tokoh masyarakat, Dinas Kabupaten dan UPTD Pariwisata, kantor kepolisian serta masyarakat yang terkait. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian *explanatory* merupakan penelitian dengan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan cara pengambilan sampel gugus bertahap. Unit analisis yang diteliti adalah rumah tangga. Tahap pertama, populasi yang ditetapkan menjadi populasi sampling pertama yaitu pelaku usaha informal industri pariwisata yang terdapat di sekitar Pantai Barat dan Timur Pangandaran sebagai sampel pertama. Tahap kedua, dari beberapa pelaku usaha informal, diambil empat jenis usaha/pekerjaan yang paling dominan terdapat di kawasan wisata Pangandaran, yaitu: kelompok pedagang kaki lima (PKL), tukang becak, jasa penyewaan sepeda, dan ojek perahu. Masing-masing kelompok ini memiliki organisasi atau kelompok. Keempat kelompok tersebut dijadikan sampel kedua dan sebagai populasi sampling ketiga. Tahap terakhir, pengambilan responden dilakukan secara acak. Kelompok tukang becak atau Himpunan Becak Bulak Laut (HBBL) memiliki 41 anggota lalu diambil responden sebanyak 7 orang. Kelompok penyewaan sepeda atau Kelompok Sewaan Sepeda Wisata Pangandaran (KSSWP) memiliki 53 anggota lalu diambil responden sebanyak 5 orang. Kelompok ojek perahu atau Organisasi Perahu Pesiir Pangandaran (OP3) memiliki 130 armada perahu dengan ± 500 anggota. Pengambilan responden pada kelompok OP3 ini dilakukan dengan pengambilan sampel pada armada perahu sebanyak 7 buah secara acak. Setelah itu, seluruh anggota dari masing-masing sampel perahu yang terpilih tersebut dijadikan responden. Masing-masing perahu memiliki 2-4 orang anggota, maka total keseluruhan responden dari OP3 sebanyak 21 orang.

Sementara itu, kelompok pedagang kaki lima atau PKL terdiri dari 732 anggota yang terbagi ke dalam 18 kelompok. Masing-masing kelompok kecil ini memiliki ketua dan pengurus sebagai perpanjangan tangan pengurus PKL keseluruhan untuk mengelola area berjualan. Anggota kelompok PKL yang dijadikan responden sebanyak 30 orang. Berbeda dengan 3 kelompok sebelumnya, pengambilan responden pada kelompok PKL ini tidak menggunakan metode acak karena dikhawatirkan proporsi responden yang terpilih tidak merata. Pengambilan responden pada kelompok PKL dilakukan dengan mengambil 1-2 orang pengurus dari masing-masing kelompok secara *purposive*. Lalu seluruh responden terpilih diwawancarai sesuai dengan kuesioner yang telah disusun.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif diolah dengan cara mereduksi bagian-bagian terpenting sehingga menjawab masalah penelitian yang diajukan. Data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi kuesioner responden diolah dan ditabulasi kemudian dianalisa secara deskriptif. Data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi disajikan secara deskriptif untuk mendukung dan memperkuat analisis kuantitatif. Gabungan dari data kuantitatif dan kualitatif diolah dan dianalisis dengan disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, bagan, dan gambar. Kemudian ditarik kesimpulan dari semua data yang telah diolah dan dipaparkan melalui penjelasan ilmiah.

GAMBARAN UMUM KAWASAN WISATA PANGANDARAN

Kondisi Geografis dan Sejarah Pengelolaan Kawasan Wisata Alam

Kawasan Taman Wisata Alam Pangandaran merupakan semenanjung kecil yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Semenanjung ini merupakan sebuah pulau yang dihubungkan dengan daratan utama dan dipisahkan oleh jalur sempit dan diapit diantara dua teluk dengan lebar ± 200 meter. Semenanjung Pangandaran memiliki iklim khusus dengan curah hujan rata-rata 3.196 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 250 – 300 C, dan kelembaban udara 80% – 90% (BKSDA Jawa Barat 2006).

Secara administratif pemerintahan kawasan TWA Pangandaran ini berada di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. Letak geografis kawasan Taman Wisata Alam Pangandaran berada pada koordinat 108040' BT dan 7043'' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pangandaran
- Sebelah barat, berbatasan dengan Teluk Parigi
- Sebelah timur, berbatasan dengan Teluk Pangandaran
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Cagar Alam Pangandaran

Taman Wisata Alam Pangandaran seluas 37,7 Ha merupakan salah satu bagian dari Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Pananjung Pangandaran yang memiliki 3 kawasan. Sementara dua kawasan lainnya yaitu Cagar Alam Darat seluas 492,3 Ha dan Cagar Alam Laut seluas 470 Ha.

Awal terbentuknya kawasan konservasi di Pangandaran dimulai pada masa Belanda yang dipimpin oleh Y. Eyekenen (Residen Priangan) tahun 1922. Pada masa tersebut, Residen Priangan mengusulkan kawasan Pananjung untuk dijadikan taman perburuan dengan melepaskan seekor banteng jantan, 5 ekor banteng betina, dan beberapa ekor rusa India di kawasan tersebut. Kawasan Pananjung memiliki keanekaragaman satwa dan berbagai jenis tanaman langka. Oleh karena itu, pada tahun 1934 diterbitkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.19 yang berisi penetapan kawasan hutan Pananjung Pangandaran sebagai suaka margasatwa dengan luas ± 530 Ha. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan habitat flora dan fauna di kawasan ini.

Obyek Wisata Alam

Daya tarik Pangandaran sebagai tempat wisata telah lama menjadi primadona di Jawa Barat. Secara garis besar, Pangandaran memiliki 4 obyek dan daya tarik wisata, yaitu:

1. Obyek Wisata Pantai. Keindahan Pantai Pangandaran menjadi daya tarik dan tujuan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk mengisi waktu liburan diantaranya berenang, berkeliling dengan menggunakan perahu pesiar, melihat keindahan taman laut dengan *snorkeling* atau *diving*, bermain wahana air (*jet-ski*, *banana boat*), berselancar, dan kegiatan lainnya.
2. Taman Wisata Alam Pangandaran, Cagar Alam Pananjung-Pangandaran, dan situs-situs bersejarah. Objek wisata ini merupakan satu-satunya objek wisata hutan yang ada di Pangandaran. TWA Pangandaran memiliki kekayaan sumberdaya hayati berupa flora dan fauna serta keindahan alam. Dengan berbagai ragam flora, kawasan TWA Pangandaran merupakan habitat yang cocok bagi kehidupan satwa-satwa liar. Hal lain yang menjadi daya tarik Pangandaran sebagai kawasan wisata juga terletak pada keberadaan situs-situs bersejarah di kawasan tersebut. Sebagian dari situs tersebut berdasarkan dokumen profil Desa Pangandaran (2012) adalah: (i) Gua Jepang; (ii) Batu Kalde; (iii) Gua Parat; (iv) Gua Panggung; (v) Gua Lanang; (vi) Mata Air Cirengganis.
3. Event Wisata. Adanya berbagai kegiatan seperti perlombaan, festival, dan pameran sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dan kunjungan wisatawan. Pangandaran juga terkenal dengan berbagai kegiatan unik diantaranya: (i) *Pangandaran International Kite Festival*. Festival layang-layang ini biasanya diadakan saat liburan sekolah bulan Juli dan diikuti puluhan peserta dari dalam dan luar negeri; (ii) Pangandaran Lautan *Scooter* (Palas); (iii) Hajat Laut atau syukuran nelayan. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat lokal sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki dan keselamatan hidup kepada para nelayan. Acara pelepasan sesaji dan penaburan bunga ke tengah lautan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang melihatnya. Selain itu, acara juga diramaikan oleh kegiatan lain seperti lomba perahu hias, lomba memancing, dan permainan voli pantai.
4. Sentra Cenderamata dan Kuliner yang menjadi daya tarik wisata Pangandaran.

PENGARUH KAWASAN WISATA PANGANDARAN TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Jenis-jenis Pekerjaan di Sektor Pariwisata

Adanya kegiatan pariwisata di Pangandaran membuka banyak lapangan pekerjaan. Masyarakat lokal maupun dari berbagai daerah berdatangan ke kawasan wisata untuk membuka usaha dan bekerja.

Jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh akibat adanya pengembangan pariwisata di Pangandaran, yaitu:

1. Akomodasi. Terdapat tiga jenis akomodasi di kawasan wisata Pangandaran, yaitu hotel, pondok wisata, dan *homestay*. Menurut data profil Kecamatan Pangandaran (2012), terdapat 69 hotel yang menyerap tenaga kerja sebanyak 569 orang dan 99 pondok wisata dengan jumlah tenaga kerja masing-masing satu sampai dua orang. Hotel dan pondok wisata ini tersebar di sekitar kawasan wisata, yaitu di Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Saat puncak kunjungan wisatawan, seringkali terjadi lonjakan pengunjung sehingga banyak rumah penduduk yang disewakan untuk memenuhi permintaan jasa penginapan. Sebagian besar penduduk yang memiliki rumah di sekitar kawasan wisata menawarkan jasa *homestay* baik dalam bentuk per kamar maupun satu bangunan rumah.
2. Transportasi, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, transportasi menuju Pangandaran berupa bus, minibus, angkutan umum, pesawat, atau biro perjalanan (*travel agent*); kedua, transportasi keliling Pangandaran dan sekitarnya berupa jasa ojeg, becak, mobil angkutan, atau perahu pesiar untuk menyebrang pantai. Umumnya perusahaan transportasi bus atau minibus antarkota baik pemilik maupun pekerja bukan penduduk lokal Pangandaran. Kedua, transportasi di dalam Pangandaran, terdapat 130 perahu pesiar dan \pm 500 orang pekerja. Sebagian penduduk yang memiliki mata pencaharian pokok nelayan atau petani saat musim kunjungan wisatawan mencari tambahan penghasilan dengan bekerja sebagai ojeg perahu. Namun, ada pula yang hanya bergantung pada satu pekerjaan saja. Profesi sebagai tukang becak dan ojeg motor cukup banyak dilakukan oleh warga Pangandaran -jumlahnya mencapai hingga 1000 orang- dibandingkan profesi lainnya di bidang transportasi.
3. Usaha rumah makan dan jasa kuliner. Usaha pengelolaan jasa pangan banyak ditemui di kawasan wisata Pangandaran. data yang tercatat di Kecamatan Pangandaran terdapat 23 restoran, 26 warung makan, dan 36 kafe dan karaoke di sekitar kawasan wisata. Saat liburan sekolah pada bulan Juli atau libur hari raya seringkali terjadi *excess demand*. Hal tersebut disebabkan permintaan akan penyediaan pangan melampaui kemampuan yang dapat diberikan para pengusaha pangan. Hal inilah yang melatarbelakangi tumbuhnya jasa *catering*, umumnya dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang menjual makanan minuman dan ibu rumah tangga. Pemasaran jasa *catering* ini dilakukan melalui penyebaran brosur dan *website* sehingga pengunjung dapat memesan melalui telepon atau internet terlebih dahulu sebelum sampai di tempat tujuan.
4. Penyedia Jasa dan Penyewaan. Terdapat banyak jenis penyedia jasa dan penyewaan di Pangandaran diantaranya pemandu wisata, foto keliling, sewa ban/*boogie board*, sewa sarana transportasi darat, sewa sepeda, sewa peralatan *snorkeling*, dan panti pijat. Terdapat 60 orang yang memiliki kartu keanggotaan sebagai pemandu wisata resmi, 156 orang yang membuka usaha penyewaan ban/*boogie board*, 16 orang membuka usaha penyewaan sarana transportasi darat, 53 orang membuka usaha rental sepeda, 18 orang membuka usaha penyewaan peralatan *snorkeling*. Usaha jasa penyewaan seperti sepeda tergolong mudah dilakukan dan pendapatan yang diperoleh cukup besar

walaupun tidak bekerja setiap hari. Banyak warga Pangandaran tertarik untuk membuka usaha seperti ini. Namun, modal awal yang dibutuhkan cukup besar.

5. Pedagang. Jenis pekerjaan di sektor informal yang paling mendominasi adalah pedagang baik pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang pantai, pedagang asongan/keliling, maupun pedagang yang membuka kios atau warung di sekitar kawasan *homestay*. Jumlah PKL di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran tercatat sebanyak 732 orang. Sebagian besar PKL berjualan makanan minuman (kelapa muda, indomie, kupat tahu, kopi, dan lain-lain), pakaian pantai, cenderamata (asesoris dan kerajinan kerang). Selain itu, ada pula yang berjualan ikan asin dan jasa pembuatan tatto. Sementara tidak terdapat data mengenai jumlah pedagang asongan maupun jumlah kios atau warung. Namun, jumlah pedagang asongan/keliling akan meningkat saat ramai kunjungan wisatawan seperti saat libur *weekend* dan hari-hari besar. Sebagian besar pedagang keliling merupakan pedagang musiman yang datang dari luar.

Jenis dan Status Pekerjaan

Perkembangan industri pariwisata mengakibatkan beragamnya jenis pekerjaan/usaha yang berkembang di Pangandaran. Data persentase responden menurut jenis dan status pekerjaan disajikan dalam Tabel 1. Jenis pekerjaan ojeg perahu memerlukan kerjasama tim sehingga tidak mungkin dilakukan seorang diri tanpa bantuan lain. Sampel yang diambil untuk jenis pekerjaan ini adalah 7 perahu, masing-masing perahu memiliki tim yang beranggotakan 2 sampai 4 orang. Jadi, total seluruhnya ada 21 orang. Berdasarkan data pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa pada jenis pekerjaan ojeg perahu terdapat dua kategori status pekerjaan, yaitu pengusaha dengan pekerja tetap sebanyak 7 orang atau 33 persen sesuai dengan jumlah sampel perahu. Sementara 14 orang lainnya merupakan karyawan, dalam hal ini disebut Anak Buah Kapal (ABK). Sementara pada jenis pekerjaan tukang becak berbanding terbalik dengan ojeg perahu, dimana hanya diperlukan seorang saja untuk melakukannya. Oleh karena itu, status pekerjaan untuk tukang becak seluruhnya termasuk kategori berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Status pekerjaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) ditentukan oleh besarnya skala usaha. Jika skala usaha besar, maka diperlukan tenaga kerja tambahan seperti karyawan tetap atau sementara. Namun, pada skala usaha kecil biasanya dikelola sendiri atau dibantu anggota keluarga.

Dari 30 orang PKL, sebanyak 18 orang atau 60 persen termasuk ke dalam kategori berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Faktor yang melatarbelaknginya yaitu skala usaha masih kecil (hanya satu kios saja) dan omset yang diperoleh belum mencukupi untuk membayar tenaga tambahan. Sementara 11 orang atau 37 persen responden termasuk ke dalam kategori berusaha sendiri dengan bantuan keluarga atau pekerja sementara. Tenaga kerja tambahan atau sementara biasanya digunakan oleh pedagang yang memiliki lebih dari satu kios atau digunakan saat musim puncak kunjungan wisata saja. Umumnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pedagang pakaian dan makanan minuman. Saat terjadi *excess demand* pada musim puncak kunjungan, maka dibutuhkan tenaga tambahan untuk mencukupi peningkatan permintaan pelayanan terhadap pengunjung. Hanya terdapat 1 orang atau 3 persen dari PKL yang termasuk kategori pengusaha dengan pekerja tetap karena telah memiliki skala usaha yang cukup luas.

Jenis pekerjaan rental/penyewaan sepeda dapat dikatakan mudah dilakukan dan dapat dilakukan sendiri walaupun saat musim puncak kunjungan. Namun, ada pula yang menggunakan tenaga tambahan dari anggota keluarga untuk membantu mengelola usaha. Faktor yang melatarbelaknginya yaitu tingginya permintaan dari pengunjung yang melampaui batas kemampuan yang dimilikinya. Umumnya jenis usaha rental sepeda ini dikelola langsung oleh pemiliknya. Namun, ada pula yang menggunakan tenaga kerja dan tidak turun langsung mengelola usahanya. Dari 5 orang responden yang membuka usaha jasa rental/penyewaan sepeda, sebanyak 3 orang atau 60 persen termasuk ke dalam kategori berusaha sendiri tanpa bantuan lain; 1 orang atau 20 persen termasuk kategori berusaha sendiri dengan bantuan anggota keluarga atau pekerja sementara; dan 1 orang atau 20 persen termasuk kategori karyawan.

Pola Nafkah Ganda pada Rumah Tangga Pelaku Usaha

Penduduk Desa Pangandaran berada paling dekat dengan kawasan TWA Pangandaran sehingga bersentuhan langsung dengan perkembangan industri pariwisata. Perkembangan industri pariwisata membawa banyak perubahan baik terhadap kehidupan masyarakat maupun lingkungannya. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti sarana dan prasarana terus ditingkatkan sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Namun, hal tersebut berdampak pada penyempitan luas lahan pertanian, lahan kosong, maupun lahan pemukiman. Desa Pangandaran tidak memiliki

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Jenis dan Status Pekerjaan di Desa Pangandaran Tahun 2012

Jenis Pekerjaan	Status Pekerjaan ¹⁾				Total
	Berusaha sendiri tanpa bantuan lain	Berusaha sendiri dengan bantuan keluarga/ pekerja sementara	Pengusaha dengan karyawan tetap	Karyawan	
Ojeg perahu	0 (0%)	0 (0%)	7 (33%)	14(67%)	2 (100%)
Pedagang kaki lima	18 (60%)	11 (37%)	1 (3%)	0 (0%)	30 (100%)
Tukang becak	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
Rental sepeda	3 (60%)	1 (20%)	0 (0%)	1 (20%)	5 (100%)

Keterangan: 1) Menurut kriteria BPS (2010)

lahan pertanian karena tergusur oleh keberadaan hotel,

restoran, dan sarana lainnya. Luas lahan pertanian di Desa Pananjung yang juga berada dekat dengan kawasan wisata hanya tersisa ± 10 persen dari luas total wilayah desa. Akibatnya, sebagian besar penduduknya beralih profesi dari sektor pertanian ke nonpertanian. Ada pula masyarakat yang masih bertahan di sektor pertanian sebagai pemilik, penggarap, maupun buruh tani. Namun, biasanya lahan tersebut terdapat di desa lain.

Strategi nafkah dilihat dari segi jenis mata pencaharian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu pariwisata dan nonpariwisata (pertanian dan jasa lain). Jenis mata pencaharian yang dilakukan rumah tangga responden dapat berasal dari satu atau beberapa macam. Oleh karena responden yang diteliti adalah rumah tangga pelaku usaha pariwisata, maka seluruhnya memiliki jenis mata pencaharian pariwisata.

Strategi nafkah yang diterapkan responden dalam rumah tangga juga beragam. Sebagian rumah tangga responden hanya memiliki satu sumber nafkah (usahatunggal). Ada pula yang menerapkan strategi nafkah dengan melakukan lebih dari satu jenis usaha (multi usaha) baik yang masih dalam sektor pariwisata maupun nonpariwisata. Berikut adalah data jumlah rumah tangga responden menurut strategi nafkah dan jenis usaha yang diteliti.

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 41 rumah tangga responden menerapkan strategi nafkah di sektor pariwisata baik usaha tunggal maupun ganda (multi usaha). Strategi nafkah usaha tunggal yang dimaksud adalah hanya melakukan satu jenis mata pencaharian saja yang dilakukan oleh kepala rumah tangga (suami). Pola seperti ini dilakukan pada 19 rumah tangga responden dengan rincian: 6 rumah tangga ojeg perahu; 10 rumah tangga pedagang kaki lima; 1 rumah tangga rental sepeda; dan 2 rumah tangga tukang becak. Umumnya pola seperti ini dilakukan oleh rumah tangga yang baru menikah dan memiliki anak kecil, atau rumah tangga yang seluruh anaknya telah berkeluarga.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga menurut Strategi Nafkah di Sektor Pariwisata dan Nonpariwisata berdasarkan Jenis Usaha yang Diteliti di Desa Pangandaran Tahun 2012

Jenis Usaha	Strategi nafkah pariwisata		Strategi nafkah pariwisata dan nonpariwisata	Total
	Usaha tunggal	Multi usaha		
Ojeg perahu	6	3	12	21
PKL	10	12	8	30
Rental sepeda	1	3	1	5
Tukang becak	2	4	1	7
Total	19	22	22	63

Strategi nafkah multi usaha pada sektor pariwisata diterapkan oleh 22 rumah tangga. Strategi nafkah multi usaha yang dimaksud adalah menerapkan lebih dari satu jenis usaha namun masih dalam sektor pariwisata. Hal tersebut dilakukan oleh satu atau beberapa orang anggota rumah tangga yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pola seperti ini paling banyak dilakukan pada rumah tangga responden pedagang kaki lima, yaitu sebanyak 12 rumah tangga.

Ada pula sebagian rumah tangga responden yang menerapkan strategi nafkah ganda di sektor pariwisata dan nonpariwisata. Pola seperti ini dilakukan oleh 22 rumah tangga responden, paling banyak pada responden dengan jenis usaha ojeg perahu yaitu 12 rumah tangga dan pedagang kaki lima 8 rumah tangga. Sementara pada responden dengan jenis usaha rental sepeda dan tukang becak masing-masing 1 rumah tangga.

Pilihan strategi nafkah yang dilakukan responden diluar jenis usaha yang diteliti sangat beragam, yaitu menyewakan *homestay*, karyawan hotel/restoran, membuka penyewaan ban, mengelola WC umum, *catering*, *home industry* ikan asin. Selain itu, terdapat pula kombinasi dari jenis usaha yang diteliti seperti ojeg perahu dengan PKL, rental sepeda dengan PKL, tukang becak dengan PKL, ojeg perahu dengan tukang becak. Sementara pilihan strategi nafkah yang dilakukan rumah tangga responden diluar pariwisata yaitu nelayan, petani, warung sembako, wiraswasta, buruh pabrik, *home industry* gula merah, dan pedagang pasar.

Ada pula rumah tangga responden yang melakukan strategi nafkah ganda di kedua sektor pariwisata dan nonpariwisata, seperti pada rumah tangga responden ojeg perahu yang juga memiliki usaha sebagai nelayan dan menyewakan *homestay*. Selain itu, ada pula rumah tangga ojeg perahu yang mengelola usaha *home industry* gula merah dan berdagang kaki lima di pantai.

Pada jenis usaha ojeg perahu, pilihan strategi nafkah lain di sektor pariwisata yang dilakukan yaitu *homestay*, karyawan hotel, dan pedagang kaki lima. Sementara itu, pilihan strategi nafkah diluar pariwisata yang dilakukan beragam, yaitu warung sembako, percetakan, pertanian (nelayan dan petani), buruh pabrik, dan *homeindustry* gula merah. Ada pula yang menerapkan kombinasi jenis usaha pariwisata dan nonpariwisata, seperti *homeindustry* dan pedagang kaki lima, nelayan dan *homestay*, buruh pabrik dan pedagang kaki lima.

Pada jenis usaha pedagang kaki lima, pilihan strategi nafkah lain di sektor pariwisata yang dilakukan yaitu penyewaan ban, ojeg perahu, rental sepeda, *homestay*, wc umum, *guide*, *catering*, *homeindustry* pakaian pantai, dan tukang becak. Terdapat rumah tangga responden yang melakukan lebih dari satu jenis usaha seperti *homestay* dan wc umum atau *homestay* dan *guide*. Sementara itu, pilihan strategi nafkah diluar pariwisata yang dilakukan beragam, yaitu wiraswasta, pertanian (nelayan dan petani), dan buruh pabrik. Ada pula yang menerapkan kombinasi jenis usaha pariwisata dan nonpariwisata, seperti wiraswasta (pemilik pabrik kayu) dan *homestay*.

Pada jenis usaha rental sepeda dan tukang becak, masing-masing hanya satu rumah tangga yang melakukan strategi nafkah diluar sektor pariwisata yaitu *homeindustry* dan pedagang pasar. Pilihan strategi nafkah lain di sektor

pariwisata yang dilakukan yaitu pedagang kaki lima, ojeg perahu, *homestay*, karyawan hotel, dan karyawan restoran. Ada pula rumah tangga yang menerapkan lebih dari satu jenis usaha pariwisata, seperti pedagang kaki lima dan *homestay*.

Berbagai penjelasan diatas menunjukkan bahwa lapangan berusaha/ pekerjaan yang tercipta akibat adanya industri pariwisata dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Pangandaran. Selain itu, mata pencaharian pariwisata ini juga menjadi pilihan strategi nafkah yang diminati penduduk. Hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha-usaha untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan aktivitas wisata.

Struktur Pendapatan

Pengukuran mengenai struktur pendapatan masyarakat pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keberadaan industri pariwisata terhadap jumlah dan tingkat pendapatan masyarakat setempat. Untuk mengukur hal tersebut, dilakukan analisis terhadap struktur pendapatan masyarakat khususnya kepada rumah tangga pelaku usaha pariwisata. Menurut penuturan beberapa responden, kegiatan pariwisata memiliki andil cukup besar dalam menopang pendapatan rumah tangga. Pariwisata menjadi pilihan strategi nafkah yang dapat diandalkan untuk mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga. Pendapatan dari sektor pariwisata pada rumah tangga yang melakukan multi usaha berasal dari beragam sumber, yaitu jenis usaha yang diteliti (ojeg perahu, pedagang kaki lima, tukang becak, rental sepeda) dan jenis usaha lain yang masih di sektro pariwisata. Rumah tangga yang menerapkan jenis usaha tunggal maka seluruh pendapatannya berasal dari sumber nafkah, yaitu pariwisata. Sementara pada rumah tangga yang menerapkan multi usaha dapat berasal lebih dari satu sumber yang dibedakan menjadi 3, yaitu: (i) jenis usaha yang diteliti; (ii) jenis usaha lain masih di sektor pariwisata; dan (iii) jenis usaha dari nonpariwisata.

Penjelasan dari Tabel 3 juga menunjukkan bahwa rumah tangga responden yang menerapkan strategi nafkah ganda (multi usaha) memiliki rata-rata pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga responden yang menerapkan strategi nafkah usaha tunggal. Terutama pada pelaku usaha ojeg perahu dan pedagang kaki lima, perbedaan pendapatan rumah tangga yang menerapkan usaha tunggal dengan multi usaha sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin beragam strategi nafkah (jenis usaha) yang diterapkan dalam suatu rumah tangga, maka semakin besar pula pendapatan yang diperolehnya. Merujuk pada penetapan nilai Upah Minimum Regional Kabupaten Ciamis (Rp793.750), rata-rata pendapatan per bulan pada masing-masing jenis usaha melebihi nilai UMR tersebut. Rata-rata pendapatan juga melebihi standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* sebesar USD 2/kapita/hari atau \pm Rp18.000,00/kapita/hari (\pm Rp 540.000/kapita/bulan). Pada masing-masing jenis usaha terlihat bahwa pariwisata memberikan kontribusi pendapatan lebih besar dibandingkan nonpariwisata. Pariwisata secara keseluruhan menyumbang sebesar 82 persen dari total pendapatan selama satu bulan. Hal ini menunjukkan keberadaan industri pariwisata sangat penting untuk menopang perekonomian rumah tangga penduduk lokal. Penduduk lokal sangat bergantung terhadap adanya aktivitas wisata untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sementara dari sektor nonpariwisata berkontribusi

sebesar 18 persen dari total pendapatan.

Tabel 4. Total Pendapatan per Pelaku Usaha per Hari menurut Jenis Usaha dan Musim Kunjungan Wisatawan di Desa Pangandaran Tahun 2012

Jenis Usaha	Musim Kunjungan Wisatawan	Total Pendapatan per Hari (Rp)			Rata-rata per bulan (Rp)
		Rata-rata	Min	Mak	
Ojeg Perahu	Sepi pengunjung	30.700	15 000	90.000	2.307.000
	Libur weekend	81.000	35 000	200.000	
	Libur longweekend	208.500	80 000	500.000	
	Puncak kunjungan	482.600	215 000	1.300.000	
Pedagang Kaki Lima	Sepi pengunjung	29.000	10 000	50.000	3.515.000
	Libur weekend	130.000	50 000	750.000	
	Libur longweekend	270.000	100 000	1.000.000	
	Puncak kunjungan	710.000	300 000	2.000.000	
Tukang Becak	Sepi pengunjung	20.000	10 000	30.000	1.010.400
	Libur weekend	40.000	30 000	50.000	
	Libur longweekend	70.000	50 000	100.000	
	Puncak kunjungan	125.000	100 000	200.000	
Rental Sepeda	Sepi pengunjung	10.000	20.000	30.000	4.456.400
	Libur weekend	135.000	100.000	175.000	
	Libur longweekend	440.000	300.000	600.000	
	Puncak kunjungan	1.150.000	1.000.000	1.750.000	

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata erat kaitannya dengan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karenanya, besar pendapatan yang diterima para pelaku usaha pariwisata selalu mengalami pasang surut sesuai musim kunjungan wisatawan. Umumnya dibedakan menjadi 4 musim, yaitu musim sepi pengunjung seperti hari kerja; musim libur sabtu-minggu (*weekend*); musim libur *long weekend*; dan musim puncak kunjungan wisatawan

pada hari-hari besar seperti hari raya, liburan sekolah, dan tahun baru. Data mengenai total pendapatan responden menurut jenis usaha dan musim kunjungan wisatawan disajikan dalam Tabel 4 di atas tersebut.

Saat musim sepi pengunjung seperti pada hari kerja, pendapatan yang diperoleh pelaku usaha setiap harinya cukup rendah berkisar antara Rp10 000 sampai Rp90 000 bahkan kerap tak mendapat pemasukan. Saat musim libur Sabtu-Minggu (*weekend*), pendapatan yang diperoleh meningkat, yaitu antara Rp30 000 sampai Rp750 000. Pendapatan yang diperoleh saat musim libur long weekend meningkat dibanding libur weekend biasa yaitu berkisar antara Rp50 000 sampai Rp1 000 000. Saat musim puncak kunjungan, pendapatan yang diperoleh sangat tinggi, berlipat ganda dari biasanya yaitu mencapai Rp100 000 hingga Rp2 000 000. Tingginya pendapatan yang diperoleh pada saat musim puncak kunjungan wisatawan biasanya digunakan sebagai tabungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari disaat musim sepi kunjungan. Ada pula yang menggunakannya sebagai modal untuk membuka usaha baru atau memperluas skala usaha yang sudah ada.

Jumlah pengunjung/wisatawan mempengaruhi besarnya permintaan akan pelayanan jasa wisata. Hubungan antara jumlah pengunjung/wisatawan dengan besarnya permintaan pelayanan jasa adalah searah. Jika jumlah pengunjung/wisatawan menurun, maka permintaan akan pelayanan jasa wisata pun rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya omset yang diperoleh para pelaku usaha pariwisata yang sangat bergantung dari permintaan wisatawan. Salah satu contoh pada jenis usaha ojek perahu, para penyedia jasa ojek perahu ini penghasilannya akan turun jika jumlah wisatawan sedikit. Hal ini karena perahu tidak dapat berjalan jika tidak ada permintaan dari wisatawan.

PENGARUH KAWASAN WISATA PANGANDARAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL

Peran Serta Masyarakat Pangandaran

Perkembangan pariwisata tentu tak terlepas dari dukungan masyarakat lokal. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat Pangandaran dalam kegiatan wisata, yaitu:

1. Menjaga image/citra positif. Pelaku usaha pariwisata sangat berperan penting dalam hal ini karena bersentuhan langsung dengan wisatawan. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan di Pangandaran yaitu pelaku usaha seperti pedagang, tukang becak, dan lainnya berupaya untuk selalu bersikap ramah, jujur, tanggung jawab, dan tidak mengecewakan wisatawan. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap citra Pangandaran sebagai tempat wisata. Masyarakat selalu melakukan upaya menjaga kondisi kawasan wisata tetap bersih, nyaman, aman, dan tertib. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membuat wisatawan merasa nyaman saat berada di Pangandaran.
2. Menjaga kebersihan kawasan wisata, diantaranya dengan: (i) mengelola pembuangan sampah,

mengadakan operasi bersih setiap hari Sabtu, dan menyediakan tempat sampah dan papan himbauan

3. Menjaga keamanan kawasan wisata, yaitu dengan mengadakan kegiatan ronda malam terutama pada saat musim puncak kunjungan wisata
4. Menjaga kelestarian budaya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan budaya seperti Hajat Laut yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Migrasi Masuk Penduduk

Daya tarik Pangandaran sebagai daerah wisata tidak hanya menarik minat wisatawan untuk menikmati keindahannya. Lebih dari itu, Pangandaran menawarkan peluang kerja dan berusaha yang dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi penduduk lokal, namun juga penduduk dari daerah lain. Terbukanya lapangan pekerjaan ini memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Oleh karena itu, banyak penduduk yang melakukan migrasi ke Pangandaran baik untuk sementara waktu maupun menetap seumur hidup.

Umumnya penduduk yang melakukan migrasi sementara adalah para pencari kerja seperti pedagang yang berjualan selama musim liburan lalu kembali ke daerah asal setelah musim liburan usai. Ada pula karyawan hotel, restoran, bank, mini market, dan sebagainya yang ditugaskan di Pangandaran untuk urusan pekerjaan sementara waktu lalu dipindahkan ke daerah lain. Namun, ada pula yang melakukan migrasi menetap. Umumnya dilakukan oleh penduduk pendatang yang menikah dengan penduduk lokal. Dalam penelitian ini, responden yang diteliti tidak hanya penduduk asli Pangandaran, namun juga dijumpai penduduk pendatang.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kehadiran penduduk pendatang bagi penduduk lokal adalah semakin menambah persaingan dalam hal mengakses peluang kerja dan berusaha. Bahkan, terdapat beberapa jenis usaha yang dikuasai oleh penduduk luar Pangandaran, seperti pengusaha hotel berbintang dan hotel melati dan perusahaan jasa angkutan (bus dan angkutan umum). Hal tersebut disebabkan keterbatasan modal dan ketidakmampuan penduduk lokal untuk membuat usaha hotel atau jasa angkutan.

Saat ramai pengunjung, banyak pedagang musiman yang datang ke Pangandaran. Sebagian dari pedagang musiman menyewa rumah di Pasar Wisata atau di sekitar Pasar Ikan untuk tempat tinggal mereka selama di Pangandaran. Ada pula yang tidak memiliki tempat tinggal dan hanya beristirahat di sarana umum seperti mushola/masjid atau di kios pedagang. Hal demikian dianggap merusak keindahan kawasan wisata karena terlihat kumuh. Kehadiran pedagang keliling dan pengamen di kawasan wisata dapat mengganggu aktivitas pengunjung yang sedang berwisata. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya citra Pangandaran sebagai kawasan wisata.

Pola Kerjasama

Sebagian besar pelaku usaha di Pangandaran memiliki kelompok/organisasi masing-masing sesuai jenis usahanya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki aturan diantaranya mengenai pembagian ruang usaha serta pengelolannya. Aturan tersebut ditujukan agar tercipta

kerjasama yang baik antar sesama pelaku usaha. Dalam penelitian ini, diambil 4 kelompok yang akan dianalisis mengenai pola kerjasama pada masing-masing kelompok. Berikut adalah pembahasan mengenai pola kerjasama pada kelompok-kelompok berdasarkan jenis usahanya.

Pola Kerjasama Organisasi Perahu Pesiar Pangandaran (OP3)

Organisasi Perahu Pesiar Pangandaran (OP3) merupakan organisasi besar dan paling berpengaruh di Pangandaran. Jumlah anggotanya mencapai 500 orang. Selain itu, organisasi ini pun memiliki andil cukup besar dalam pengelolaan kegiatan pariwisata di Pangandaran.

OP3 memiliki aturan-aturan yang tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sanksi yang dikenakan untuk anggota yang melanggar pun cukup tegas. Beberapa aturan yang terdapat dalam organisasi ini adalah setiap perahu pesiar wajib menyediakan pelampung, memasang bendera merah putih, dan aturan yang paling tegas yaitu tidak dibolehkan membawa penumpang lebih dari 10 orang. Hal ini ditujukan untuk menjaga keselamatan penumpang. Bila aturan ini dilanggar, maka seluruh awak kapal tersebut baik juragan maupun anak buah dikenakan sanksi yaitu mesin perahu disita selama tiga hari dan wajib membayar denda Rp300.000. Uang dari biaya denda tersebut digunakan untuk kepentingan organisasi. Dalam anggaran dasar juga tertulis mengenai pembagian hasil, yaitu total pendapatan yang diperoleh setelah bekerja dalam satu hari terlebih dahulu diambil untuk keperluan membeli bahan bakar dan konsumsi anak buah kapal. Setelah itu, sisa pendapatan tersebut dibagi dua, 50 persen untuk pemilik (juragan) perahu, 50 persen untuk anak buah kapal.

Organisasi Perahu Pesiar Pangandaran (OP3) memiliki pola kerjasama yang baik dan tercipta kerukunan antar sesama anggota. Salah satu contohnya dibuktikan dengan sikap saling pengertian dalam menarik penumpang. Walaupun tidak terdapat sistem giliran membawa penumpang, tidak terjadi pertentangan atau konflik terkait hal tersebut. Selain itu, OP3 juga menjalin kerjasama yang baik dengan kelompok usaha lain seperti dengan kelompok penyewaan ban renang dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya dalam hal menjalankan kegiatan operasi bersih dan menjaga keamanan kawasan wisata.

Menurut penuturan dari ketua OP3, anggota OP3 dapat dikatakan tertib menaati aturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan jarang terjadi kasus pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anggota. Kegiatan pertemuan seluruh anggota rutin dilakukan setiap bulan antara lain ditujukan untuk menjalin silaturahmi antar anggota.

Tingkat kerjasama dapat diukur berdasarkan beberapa indikator yang dapat mencerminkan pola kerjasama tersebut, yaitu: (i) menaati aturan yang tertulis dalam anggaran dasar organisasi; (ii) mengikuti pertemuan rutin; (iii) membayar iuran kas organisasi. Berikut adalah data mengenai jumlah dan persentase responden menurut indikator pola kerjasama pada OP3.

Berdasarkan data di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama yang terdapat dalam OP3 tergolong tinggi. Hal tersebut terlihat dari tingginya persentase responden pada masing-masing indikator pola kerjasama. Pengukuran yang dilakukan terhadap responden dianggap

dapat mewakili seluruh anggota organisasi.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden menurut Indikator Pola Kerjasama pada Organisasi Perahu Pesiar Pangandaran (OP3) di Desa Pangandaran Tahun 2012

No	Indikator	Jumlah Responden		Total
		Tidak	Ya	
1	Mematuhi aturan	0 (0%)	21 (100%)	21(100%)
2	Mengikuti pertemuan rutin	0 (0%)	21 (100%)	21(100%)
3	Membayar iuran kas organisasi	0 (0%)	21 (100%)	21(100%)

Pola Kerjasama pada Kelompok Sewaan Sepeda Wisata Pangandaran (KSSWP)

Bentuk-bentuk dari pola kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Sewaan Sepeda Wisata Pangandaran (KSSWP) diantaranya yaitu: (i) Terdapat pola pembagian ruang usaha, artinya tidak terjadi perebutan lahan/ruang untuk membuka rental; (ii) Terdapat aturan mengenai jumlah maksimal sepeda yang boleh disediakan setiap rental. Hal ini ditujukan agar terdapat pemerataan pelanggan di setiap rental; (iii) Setiap pelaku usaha rental sepeda diwajibkan memberikan tanda pengenal berupa tulisan nama dan lokasi rental pada sepedanya masing-masing. Hal tersebut ditujukan untuk mengenali pemilik sepeda dan lokasi usahanya; (iv) Kerjasama juga dilakukan oleh pekerja di penginapan, misalnya satpam hotel. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengunjung yang lupa mengembalikan sepeda dan membawanya ke tempat ia menginap. Biasanya, satpam akan mengembalikan kepada pemiliknya.

Selain menjalin kerjasama dalam hal usaha, para anggota KSSWP juga menjalin hubungan silaturahmi diantaranya dengan mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan setiap dua bulan sekali. Dan terdapat iuran kas yang digunakan untuk kepentingan anggota, yaitu pemberian santunan kepada anggota yang sakit atau meninggal dunia, pemberian pinjaman untuk keperluan usaha, dan sebagainya.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden menurut Indikator Pola Kerjasama pada Kelompok Sewaan Sepeda Wisata Pangandaran (KSSWP) di Desa Pangandaran Tahun 2012

No	Indikator Pola Kerjasama	Jumlah Responden		Total
		Tidak	Ya	
1	Mematuhi aturan	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)
2	Mengikuti pertemuan rutin	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)
3	Membayar iuran kas organisasi	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama yang terdapat dalam Kelompok Sewaan Sepeda Wisata Pangandaran tergolong baik. Hal ini

dibuktikan dengan data mengenai persentase responden menurut indikator pola kerjasama seperti disajikan dalam Tabel 6. Indikator yang digunakan dalam mengukur pola kerjasama kelompok sepeda sama dengan kelompok perahu pesiar.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingginya persentase responden pada masing-masing indikator pola kerjasama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerjasama yang terdapat pada kelompok ini tergolong tinggi. Pengukuran yang dilakukan terhadap responden dianggap dapat mewakili seluruh anggota kelompok.

Pola Kerjasama pada Kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bentuk-bentuk aturan yang terdapat dalam kelompok PKL berbeda dengan kelompok lain. Pada kelompok ini aturan yang dibuat berkaitan dengan penataan ruang usaha. Aturan dasar yang ditetapkan yaitu mengenai penataan dan pembagian ruang usaha (kios); luas kios yang diizinkan adalah 3 x 4 meter; kondisi bangunan yang diizinkan adalah nonpermanen. Aturan tersebut dibuat sebagai upaya untuk menyeragamkan kondisi kios. Kelompok pedagang kaki lima dibagi menjadi 18 kelompok kecil berdasarkan lokasi ruang usaha. Masing-masing kelompok memiliki ketua dan pengurus. Pembentukan kelompok kecil ditujukan untuk mempermudah dalam mengatur pembagian dan pengelolaan ruang usaha. Namun, kelompok kecil ini belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Dari 18 kelompok, hanya 8 kelompok saja yang berfungsi dengan baik. Pengukuran pola kerjasama pada kelompok PKL dilakukan kepada satu sampai dua orang responden dari masing-masing kelompok dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Data mengenai persentase responden menurut indikator pola kerjasama disajikan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden menurut Indikator Pola Kerjasama pada Kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) di Desa Pangandaran Tahun 2012

No	Indikator Pola Kerjasama	Jumlah Responden		Total
		Tidak	Ya	
1	Mematuhi aturan mengenai pembagian ruang usaha	10 (33%)	20 (67%)	30 (100%)
2	Mematuhi aturan mengenai luas yang ditetapkan, yaitu 3 x 4 meter	11 (37%)	19 (63%)	30 (100%)
3	Mematuhi aturan mengenai ketentuan pendirian bangunan nonpermanen	16 (53%)	14 (47%)	30 (100%)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa persentase responden yang menaati peraturan mengenai pembagian ruang usaha dan luas ruang usaha lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menaati aturan. Namun, persentase responden yang menaati peraturan mengenai ketentuan pendirian bangunan (kios) nonpermanen lebih kecil dibandingkan dengan yang menaati peraturan. Oleh karena

itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama yang terdapat pada kelompok pedagang kaki lima tergolong cukup baik.

Pola Kerjasama pada Himpunan Becak Bulak Laut (HBBL)

Profesi sebagai tukang becak banyak dipilih oleh masyarakat Pangandaran. Oleh karena itu, jumlah tukang becak di Pangandaran kurang lebih mencapai 1000 orang. Terdapat beberapa kelompok tukang becak sesuai dengan pangkalan, seperti kelompok becak pasar dan terminal, kelompok becak pinggir pantai, becak wisata, dan sebagainya. Masing-masing kelompok memiliki pola kerjasama berbeda-beda. Pada kelompok becak pasar dan terminal tidak terdapat pembagian giliran membawa penumpang dan tidak mengizinkan tukang becak dari pangkalan lain untuk ikut menempati ruang usaha tersebut. Berbeda halnya dengan kelompok becak pinggir pantai. Pada kelompok ini terdapat pembagian giliran membawa penumpang pada masing-masing pangkalan dan memberikan izin kepada tukang becak dari pangkalan lain menempati pangkalan tersebut namun tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

Kelompok becak wisata bekerjasama dengan pemandu wisata. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dalam hal memberikan pelayanan kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing. Pemandu wisata yang membawa rombongan wisatawan menggunakan jasa becak untuk mengelilingi kawasan wisata. Oleh karena itu, pembentukan kelompok becak wisata ditujukan untuk memudahkan koordinasi antara pemandu wisata dengan tukang becak. Sebelumnya terdapat beberapa kelompok becak wisata di Pangandaran, namun kelompok becak yang masih berjalan dengan baik hingga saat ini adalah Himpunan Becak Bulak Laut (HBBL).

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden menurut Indikator Pola Kerjasama pada Himpunan Becak Bulak Laut (HBBL) di Desa Pangandaran Tahun 2012

No	Indikator Pola Kerjasama	Jumlah Responden		Total
		Tidak	Ya	
1	Mematuhi aturan mengenai pembagian giliran membawa penumpang di pangkalan	0 (0%)	7 (100%)	7 (100%)
2	Mematuhi aturan mengenai pembagian giliran membawa wisatawan asing	0 (0%)	7 (100%)	7 (100%)
3	Mematuhi aturan mengenai pembagian pangkalan	0 (0%)	7 (100%)	7 (100%)

Oleh karena itu, HBBL dipilih sebagai sampel penelitian. Aturan yang ditetapkan pada kelompok ini sama seperti

kelompok becak yang lain, yaitu terdapat pembagian pangkalan untuk masing-masing tukang becak dan pembagian giliran membawa penumpang. Untuk pembagian giliran membawa rombongan wisatawan yang bekerjasama dengan pemandu wisata diatur oleh ketua kelompok. Data mengenai persentase responden menurut indikator pola kerjasama disajikan dalam Tabel 8 di atas tersebut.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama yang terdapat dalam HBBL tergolong tinggi. Hal tersebut terlihat dari tingginya persentase responden pada masing-masing indikator pola kerjasama. Pengukuran yang dilakukan terhadap responden dianggap dapat mewakili seluruh anggota kelompok.

Pola kerjasama juga terlihat antar pelaku usaha dan masyarakat. Hal tersebut terlihat pada dalam hal kerjasama untuk menjaga kawasan wisata, khususnya dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan kawasan wisata. Dalam hal menjalankan kegiatan pariwisata, perbedaan pandangan sering terjadi diantara sesama pelaku usaha maupun dengan masyarakat. Namun, perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik.

Gaya Hidup

Penilaian tentang gaya hidup diukur berdasarkan pandangan responden terhadap pengaruh wisatawan dalam hal berpenampilan, gaya bahasa, penggunaan handphone dan kendaraan bermotor, pola konsumsi, dan pergaulan remaja. Data mengenai jumlah dan persentase responden menurut indikator penilaian gaya hidup disajikan pada Tabel 9.

Data pada tabel terlihat bahwa seluruh responden menyetujui bahwa wisatawan/pendatang membawa pengaruh terhadap gaya berpenampilan penduduk lokal. Seperti gaya berpakaian, gaya rambut (model dan warna), dan pemakaian asesoris. Umumnya pengaruh tersebut diikuti oleh penduduk dengan usia anak-anak dan remaja. Namun, ada pula penduduk usia dewasa yang mengikuti gaya berpenampilan wisatawan. Hal ini terlihat dari sebanyak 44 persen dari responden yang menyatakan bahwa gaya berpenampilan wisatawan mempengaruhi gaya berpenampilannya seperti mengikuti model pakaian dan/atau mengecat rambut.

Kehadiran wisatawan juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial penduduk lokal diantaranya dapat terlihat dari gaya bahasa dan pola konsumsi masyarakat. Umumnya masyarakat sekitar kawasan wisata lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Namun, berdasarkan hasil penelitian 76 persen responden menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah tetap dilakukan untuk berkomunikasi dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan bahasa Indonesia hanya dipakai untuk berkomunikasi dengan wisatawan. Sementara untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari tetap menggunakan bahasa daerah. Pada pola konsumsi masyarakat juga tidak menunjukkan perubahan. Sebagian besar (83 persen) responden mengakui bahwa pola konsumsi wisatawan dengan masyarakat lokal berbeda. Pola konsumsi yang dimaksud yaitu wisatawan umumnya makan di restoran atau kafe di kawasan wisata. Namun, masyarakat tidak terpengaruh akan hal tersebut. Hal ini

terbukti dengan jarang ditemukan masyarakat lokal yang mengunjungi restoran pada hari-hari biasa. Perkembangan teknologi seperti handphone dan kendaraan bermotor saat ini menuntut masyarakat untuk mengikutinya, terutama bagi pelaku usaha. Penggunaan handphone saat ini sangat diperlukan pelaku usaha dalam pekerjaannya. Seperti mempermudah komunikasi antara sesama pelaku usaha dan juga pelaku usaha dengan wisatawan. Hal tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu, penggunaan kendaraan bermotor juga dapat memudahkan kegiatan usaha.

Kehadiran wisatawan/pengunjung ke Pangandaran juga menimbulkan dampak buruk khususnya bagi pergaulan remaja, misalnya terdapat pemuda yang mabuk-mabukan di kawasan wisata dan kasus keterlibatan narkoba. Hal tersebut didukung oleh 65 persen responden yang menyetujui bahwa terdapat tindakan mabuk-mabukan dan keterlibatan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh penduduk Pangandaran khususnya pemuda/remaja.

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden menurut Indikator Penilaian Gaya Hidup di Desa Pangandaran Tahun 2012

No	Indikator Penilaian Gaya Hidup	Jumlah Responden (Persentase)		Total
		Tidak Setuju	Setuju	
1	Gaya berpenampilan	0 (0%)	63 (100%)	63 (100%)
2	Gaya berpenampilan diikuti responden	35 (56%)	28 (44%)	63 (100%)
3	Gaya bahasa	48 (76%)	15 (24%)	63 (100%)
4	Penggunaan handphone dan motor	0 (0%)	63 (100%)	63 (100%)
5	Pola konsumsi	52 (83%)	11 (17%)	63 (100%)
6	Pergaulan remaja	22 (35%)	41 (65%)	63 (100%)

Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku menyimpang yaitu tindakan perjudian, kriminalitas (pencurian), penggunaan narkoba, dan prostitusi. Tindakan-tindakan seperti ini umumnya dipelopori oleh pendatang dan mempengaruhi penduduk lokal untuk melakukan tindakan serupa. Pendatang dalam hal ini umumnya bukan wisatawan yang ingin berwisata, namun seseorang maupun sekelompok orang yang memang datang secara sengaja karena memiliki tujuan tertentu.

Menurut informasi dari kantor kepolisian setempat, kasus yang paling sering terjadi adalah kasus pencurian khususnya kendaraan bermotor. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara perampokan secara langsung dan tindakan penipuan. Data kepolisian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011

terjadi 40 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pencurian tersebut sebagian besar dilakukan oleh sindikat yang memiliki jaringan cukup luas sehingga polisi kesulitan menangkap pelaku. Sebagian besar kasus ini masih dalam proses dan penyelidikan. Selain pencurian kendaraan bermotor, juga ditemukan kasus pencurian handphone, dompet, dan laptop.

Pencurian ini biasanya dilakukan di hotel maupun di kawasan pinggir pantai saat musim puncak kunjungan. Ada pula pencuri yang mengintai dan mengambil barang dari kios pedagang khususnya kios pakaian. Namun, pedagang umumnya tidak melaporkan kepada kantor kepolisian. Tindakan pencurian ini dilakukan oleh pendatang dan diikuti oleh sekelompok penduduk lokal. Beberapa kali polisi menemukan bahwa yang melakukan tindakan pencurian adalah penduduk lokal. Selain pencurian, tindak kriminalitas yang pernah beberapa kali terjadi adalah perkelahian antara penduduk lokal dengan sekelompok gank motor dari luar Pangandaran.

Sementara itu, tidak ditemukan tindakan perjudian di sekitar kawasan wisata Pangandaran. Tindak mabuk-mabukan sering dijumpai pada saat-saat tertentu seperti malam tahun baru, namun masih dilakukan dalam batas wajar sehingga tidak meresahkan masyarakat. Bentuk perilaku menyimpang yang paling meresahkan masyarakat adalah berkembangnya kafe atau warung remang-remang yang menyediakan minuman keras dan wanita penghibur/PSK. Umumnya PSK berasal dari luar Pangandaran, namun pelanggan yang menggunakan jasanya tidak hanya wisatawan. Penduduk lokal juga ditemukan menggunakan jasa PSK. Selain penginapan, panti pijat dan tempat karaoke juga kerap kali menjadi tempat terjadinya tindakan asusila tersebut. Peristiwa ini berakibat buruk bagi perilaku penduduk lokal.

Hal tersebut terbukti dengan ditemukan beberapa remaja berseragam sekolah yang masuk ke warung remang-remang. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara menolak pengunjung yang ingin menggunakan homestay miliknya untuk berbuat asusila. Masyarakat mengakui dapat mencurigai pengunjung yang ingin berbuat asusila sehingga bila ditemukan hal demikian dapat dihindari. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat telah melakukan upaya untuk menutup warung remang-remang dan menghilangkan PSK dari kawasan wisata Pangandaran. Fenomena seperti ini dianggap dapat menurunkan citra/image Pangandaran sebagai kawasan wisata. Namun, belum ditemukan upaya terbaik untuk mengatasi hal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan masalah penelitian yang telah disusun di pendahuluan, maka terdapat tiga kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian tersebut yaitu: (1) strategi-strategi yang dilakukan oleh pekerja sektor informal khususnya pedagang makanan di Jalan Babakan untuk mempertahankan kehidupan adalah pola nafkah ganda, strategi mengeksploitasi diri, strategi menekan biaya berdagang, strategi pemanfaatan lahan, strategi mempekerjakan anggota keluarga, strategi pembagian kerja, strategi ekspansi usaha, serta strategi berhutang dan mencairkan investasi serta strategi mengamankan usaha

bisnis makanan; (2) sebab-sebab pekerja sektor informal khususnya pedagang makanan di Jalan Babakan bertahan di lahan umum adalah adanya tuntutan hidup, tetapi sebab-sebab pekerja sektor informal memilih bertahan berdagang makanan di Jalan Babakan adalah ingin menambah kekayaan, dan adanya tuntutan hidup. Sebagian besar pedagang makanan di Jalan Babakan menjalankan usaha makanan bertempat di lahan yang bukan miliknya sendiri dan mempunyai alasan untuk memenuhi tuntutan hidup; (3) cara pengelolaan surplus pendapatan para pekerja sektor informal khususnya pedagang makanan di Jalan Babakan adalah menabung di rumah, menabung di bank, membeli alat elektronik, membeli hewan, membeli perhiasan, membeli rumah, membeli sawah/lahan, dan ekspansi usaha serta menyekolahkan anggota keluarga. Keberadaan sektor pariwisata di Pangandaran telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Berbagai lapangan pekerjaan yang tercipta ini dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penduduk lokal yang menguasai beberapa jenis pekerjaan (usaha) pariwisata. Usaha tersebut diantaranya seperti: (i) akomodasi, yaitu homestay dan pondok wisata; (ii) transportasi, yaitu becak, ojek perahu, ojek motor; (iii) usaha rumah makan dan jasa kuliner, yaitu rumah makan/restoran dan jasa catering; (iv) penyedia jasa dan penyewaan, yaitu guide tukang foto keliling; penyewaan ban, sepeda, sarana transportasi darat, dan peralatan snorkeling; (v) pedagang, yaitu pedagang kaki lima di sepanjang kawasan pantai, pedagang asongan/ keliling, dan pedagang yang membuka kios di sekitar kawasan homestay.

Jenis-jenis pekerjaan di sektor pariwisata Pangandaran yang dilakukan oleh masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga yang terlibat didalamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari kontribusinya yang sangat nyata dalam menyumbang total pendapatan rumah tangga. Seluruh rumah tangga responden menjadikan sektor pariwisata sebagai strategi nafkah utama untuk menopang perekonomian rumah tangganya. Bahkan, sebagian besar diantaranya melakukan strategi nafkah ganda (multi usaha) pada sektor pariwisata. Pendapatan rumah tangga para pelaku usaha pariwisata dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah tangga setiap bulan melebihi standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Ciamis yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat dan standar garis kemiskinan yang ditetapkan World Bank.

Kehadiran industri pariwisata juga membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial penduduk lokal. Pada perilaku masyarakat, khususnya pola gaya hidup, terlihat bahwa terjadi pergeseran akibat kehadiran wisatawan/pendatang dan kegiatan pariwisata. Selain itu, juga timbul perilaku menyimpang seperti tindak kriminalitas, prostitusi, dan penggunaan narkoba yang umumnya terjadi saat musim puncak kunjungan wisatawan. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk luar Pangandaran, tetapi juga dilakukan oleh penduduk Pangandaran. Sementara pada pola kerjasama khususnya antar sesama pelaku usaha, keberadaan industri pariwisata mempererat hubungan antara pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari adanya organisasi atau kelompok pada masing-masing jenis usaha. Masing-masing organisasi/kelompok ini memiliki aturan mengenai pembagian ruang usaha serta pengelolannya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kerjasama yang baik antar sesama pelaku usaha. Lebih dari itu, kerjasama juga

terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat khususnya dalam hal menjaga kawasan wisata.

Saran

Terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan pengelola pariwisata Pangandaran sebaiknya melakukan upaya pengelolaan kawasan pantai, khususnya menata pembagian ruang usaha pedagang kaki lima, penyewaan ban, dan penataan perahu (baik perahu wisata maupun nelayan).
2. Perlu adanya peningkatan fungsi organisasi/kelompok pada masing-masing jenis usaha agar tercipta pola kerjasama yang lebih baik tidak hanya diantara masing-masing anggota kelompok, namun juga dengan kelompok lain. Pemerintah dan pengelola kawasan wisata sebaiknya melibatkan kelompok-kelompok tersebut untuk membantu mengelola dan menjaga kawasan wisata. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan rasa memiliki bagi pelaku usaha pariwisata.
3. Perlu adanya kebijakan pemerintah dalam hal membatasi investor luar maupun pemodal besar yang masuk dan berusaha ke Pangandaran terutama jika dapat mematikan usaha penduduk lokal yang umumnya terbatas oleh modal. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan eksistensi usaha dari penduduk lokal.
4. Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mencegah atau meminimalisasi timbulnya dampak negatif akibat kehadiran pengunjung, seperti tindakan kriminalitas, prostitusi, dan peredaran narkoba, diantaranya dengan cara meningkatkan pengawasan terutama di saat musim puncak kunjungan wisata; menetapkan peraturan dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
5. Bagi akademisi, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai dampak pariwisata di Pangandaran terutama aspek-aspek lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. [internet]. [dikutip 17 Februari 2012]. Dapat diunduh dari: <http://kppo.bappenas.go.id/preview/282/>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Geografi dan Iklim. Jakarta [ID]: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Hotel dan Pariwisata. Jakarta [ID]: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Konsep Pendapatan Rumah Tangga. Jakarta [ID]: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Penduduk dan Ketenagakerjaan. Jakarta [ID]: BPS.
- Dharmawan AH. 2001. Farm Household Livelihood Strategies and Socioeconomic Changes in Rural Indonesia. Kiel [DE]: Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. 271 hal.
- Hart, K., 1973. Informal income opportunities and urban employment in Ghana. Sektor Informal dalam urbanisasi, pengangguran, dan sektor informal di

kota. Manning C dan Effendi TN. Jakarta [ID]: PT Gramedia. 78-89

- Dharmawan AH. 2006. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Bogor [ID]. I (2). Hal. 169-192.
- Fandeli CM. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Yogyakarta [ID]: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 273 hal.
- Khairudin H. 1992. Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta [ID]: Liberty. 241 hal.
- Nurmanaf AR. 1985. Pola Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. Bogor [ID]: Pusat Penelitian Agro Ekonomi.
- Pitana IG, Gayatri PG. 2004. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta [ID]: Andi. 200 hal.
- Retnowati E. 2004. Ekoturisme di Indonesia: Potensi dan Dampak. Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian Pemanfaatan Jasa Hutan dan Non Kayu Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Peningkatan dan Pelestarian Hutan. Bogor [ID]: Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam. Hal 71-79.
- Rusli S. 1996. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta [ID]: LP3S. 132 hal.
- Scoones I. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework from Analysis. IDS Working Paper 72. [internet]. [dikutip tanggal 7 Juni 2012]. Sussex [UK]: Institute of Development Studies. Dapat diunduh dari: <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp72.pdf>
- Singarimbun M, Sofian E. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta [ID]: LP3ES. 336 hal.
- Soekanto S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru 4 Cetakan 34. Jakarta [ID]: Rajawali Pers. 518 hal.
- Suwantoro G. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta [ID]: Andi. 108 hal.
- [UU] Undang-undang. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. [internet]. [dikutip 17 Februari 2012]. Dapat diunduh dari: <http://www.budpar.go.id/userfiles/file/46361364UUTentangKepariwisata1.pdf>
- Yoeti OA. 1988. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta [ID]: Angkasa. 383 hal.
- Yoeti OA. 2008. Ekonomi Pariwisata. Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta [ID]: Kompas. 292 hal.